

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI NTB

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
1.	Data SP2D Pihak Ke-3	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	permanen
2.	Laporan Keuangan yang Belum diaudit oleh BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK
3.	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggungjawabkan	Perlindungan usaha	Permanen
4.	Rincian Informasi Terkait (Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam dokumen kontrak/pengadaan barang/jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak 2. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Perlindungan usaha	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak  Sampai dengan penyerahan berkas
5.	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama

6.	Data Pribadi penerima bantuan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 g dan h 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Infomasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
7.	Daftar user dan pasword server / aplikasi / perangkat TIK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	
8.	Source Kode Aplikasi Khusus	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	Permanen
9.	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen

10.	Hasil Audit keamanan Informasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen
11.	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan informasi tentang material sandi metode dan teknik aplikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi Informasi dari kebocoran	Keamanan data strategis	Permanen
12.	Persandian, kegiatan pencarian dan pengupasan infromasi bersandi, aktifitas infromasi bersandi, dan jaringan komunikasi bersandi			Keamanan data strategis	
13.	CatatanMedis/RekamMedis	1. UU No 14 Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g,h 2. Permenkes RI No 269/Menkes/Per/II/2008	1. Menyangkut masalah privacy 2. Kemungkinan Penyalahgunaan informasi	1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. Relevan, Kepentingan penyediaan pihak yang berwajib	Permanen

14.	Bio Data Kependudukan	15. UU No 14 Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g,h 2. UU No 23 Thn 2006 ttg administrasi kependudukan psl 85 ayat 3 3. UU No 24 thn 2014 ttg perubahan atas UU no 23 thn 2006 ttg adminitrasi kependudukan pasal 84 ayat 1	1. Privacy 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi	Melindungi perserorangan	Permanen
15.	Data Pegawai ASN	1. UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No 5 Thn 2014 ttg ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektivitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku
16.	Pengadaan Barang dan Jasa	1. UU no 14 thn 2008 ttg KIP Pasi 17 huruf b dan j 2. KUH Perdata , pasal 1338 jo Perpres No. 54 Thn 2010 ttg pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasl 35 huruf b	Persaingan Usaha yang tidak sehat / competitor		Sampai ditetapkan pemenang lelang dan diumumkan

17.	Dokumen LHKPN	1. UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j 2. UU no 8 Thn 1981 Ttg Hukum Acara Pidana pasal 322 3. UU No 43 Thn 2009 Ttg Kearsiapan pasal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. Kep.07/KPK/02/2005 Tata cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan	Relevan, kecuali utuk kepentingan penegakan hukum  Menjaga keakuratan data pemeriksaan  Selama dalam proses lelang /pengadaan sebelum diumumkan  Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang	Sampai LHKPN ditetapkan
18	Data pengaduan masyarakat, laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	1. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIIP pasal 6 3. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Menyangkut Privasi 2. Mengganggu Proses penyelidikan/Pengawasan	Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan

  
 Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB  
**Ir. HUSNANIDIATY NURDIN, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19620203-198603 2 009